



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5253004
Laman : www.kemenkumham.go.id

ka-Bkpsdm

GEA XS

04 AIG 2022

Nomor : SEK-KP.03.03-581
Lampiran : Seberkas
Hal : Pemberitahuan Seleksi Terbuka JPT Madya
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

29 Juli 2022

Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian;
2. Sekretaris Utama Lembaga;
3. Gubernur Provinsi;
(sebagaimana daftar terlampir)
di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- d. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 84);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2021);
- g. Surat Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-675/KASN/2/2022 tanggal 18 Februari 2022 hal rekomendasi persetujuan rencana pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Pengumuman Nomor SEK-KP.03.03-573 tanggal 27 Juli 2022 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan hormat disampaikan hal-hal berikut:
 - a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membuka pendaftaran Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terhitung mulai tanggal 22 Juli s.d 10 Agustus 2022;
 - b. Ketentuan dan persyaratan pendaftaran dapat dilihat dalam lampiran surat ini dan juga di laman <http://kemenkumham.go.id> atau <http://pansel.kemenkumham.go.id>.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta perkenan Saudara/i untuk dapat menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara/i, yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi dimaksud.
4. Demikian untuk maklum.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretaris Jenderal,



Konjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran I Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : SEK-KP.03.03-581
Tanggal : 29 Juli 2022

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS KEMENTERIAN

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Kementerian Sekretariat Negara;
6. Kementerian Dalam Negeri;
7. Kementerian Luar Negeri;
8. Kementerian Pertahanan;
9. Kementerian Agama;
10. Kementerian Keuangan;
11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Kementerian Kesehatan;
13. Kementerian Sosial;
14. Kementerian Ketenagakerjaan;
15. Kementerian Perindustrian;
16. Kementerian Perdagangan;
17. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
18. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Kementerian Perhubungan;
20. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
21. Kementerian Pertanian;
22. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
24. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
25. Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
26. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
27. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
29. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
30. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
32. Kementerian Riset dan Teknologi;
33. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
34. Sekretariat Kabinet.

Lampiran II Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : SEK-KP.03.03-581
Tanggal : 29 Juli 2022

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA NON KEMENTERIAN

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Badan Intelijen Negara;
4. Badan Kepegawaian Negara;
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
9. Badan Narkotika Nasional;
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI;
13. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
15. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
16. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
17. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Badan Pertahanan Nasional;
19. Badan Pusat Statistik;
20. Badan SAR Nasional;
21. Badan Standarisasi Nasional;
22. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
23. Lembaga Administrasi Negara;
24. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
25. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Lembaga Ketahanan Nasional;
27. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
28. Lembaga Sandi Negara;
29. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Lampiran III Surat Sekretaris Jenderal

Nomor : SEK-KP.03.03-581

Tanggal : 29 Juli 2022

GUBERNUR PROVINSI

1. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Gubernur Riau;
5. Gubernur Kepulauan Riau;
6. Gubernur Sumatera Selatan;
7. Gubernur Jambi;
8. Gubernur Lampung;
9. Gubernur Bengkulu;
10. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
11. Gubernur DKI Jakarta;
12. Gubernur Banten;
13. Gubernur Jawa Barat;
14. Gubernur Jawa Tengah;
15. Gubernur D.i. Yogyakarta;
16. Gubernur Jawa Timur;
17. Gubernur Kalimantan Barat;
18. Gubernur Kalimantan Selatan;
19. Gubernur Kalimantan Tengah;
20. Gubernur Kalimantan Timur;
21. Gubernur Kalimantan Utara;
22. Gubernur Sulawesi Utara;
23. Gubernur Sulawesi Tengah;
24. Gubernur Sulawesi Selatan;
25. Gubernur Sulawesi Barat;
26. Gubernur Sulawesi Tenggara;
27. Gubernur Gorontalo;
28. Gubernur Bali;
29. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
30. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
31. Gubernur Maluku;
32. Gubernur Maluku Utara;
33. Gubernur Papua;
34. Gubernur Papua Barat.



**PENGUMUMAN
NOMOR SEK-KP.03.03-573**

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil Pusat, Daerah, prajurit TNI serta anggota POLRI yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Jabatan Pimpinan Tinggi yang akan diisi:

No.	Jabatan	Eselon	Dibuka Untuk
1.	Direktur Jenderal Imigrasi	I.a	PNS, TNI dan POLRI

B. Persyaratan Umum

- Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Tidak dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- Tidak sedang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana;
- Telah menyerahkan LHKPN dalam jabatan terakhir.

C. Persyaratan Khusus

- Kualifikasi pendidikan minimal:
 - S1 atau DIV bagi PNS;
 - S2 bagi prajurit TNI/anggota POLRI.
- Sekurang-kurangnya sedang menduduki JPT Pratama (eselon II.a) dengan masa kerja jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sedang menduduki jabatan fungsional jenjang utama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada bulan Juli 2022.
- Sekurang-kurangnya memiliki pangkat:
 - Pembina Utama Muda (IV/c) bagi PNS;
 - Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama bagi prajurit TNI;
 - Brigadir Jenderal Polisi bagi anggota POLRI.

4. Berusia setinggi-tingginya:
 - 58 (lima puluh delapan) tahun pada bulan Desember 2022 bagi PNS yang menduduki JPT Pratama atau JF Utama;
 - 55 (lima puluh lima) tahun pada bulan Desember 2022 bagi prajurit TNI atau anggota Polri yang menduduki jabatan setara JPT Pratama atau JF Utama (dikecualikan bagi PNS, prajurit TNI atau anggota Polri yang sedang menduduki JPT Madya).

II. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Melakukan registrasi online melalui laman <http://pansel.kemenkumham.go.id> dan mencetak tanda bukti pendaftaran paling lambat tanggal 10 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.
- B. Mengunggah berkas lamaran pada laman <http://pansel.kemenkumham.go.id> yang terdiri dari:
 1. Surat lamaran ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-;
 2. Formulir persetujuan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi PNS, Panglima TNI bagi prajurit TNI atau Kapolri bagi anggota POLRI;
 3. Daftar Riwayat Hidup;
 4. Pakta Integritas;
 5. Fotokopi SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 6. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
 7. Fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 8. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 9. Fotokopi SPT tahun terakhir;
 10. Fotokopi tanda bukti penyerahan LHKPN pada jabatan terakhir;
 11. Fotokopi KTP;
 12. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- yang menyatakan bahwa:
 - tidak sedang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana;
 - tidak dalam proses pemeriksaan dan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- C. Formulir daftar riwayat hidup, pakta integritas, formulir persetujuan PPK, formulir surat pernyataan dan contoh surat lamaran dapat diunduh melalui laman <http://pansel.kemenkumham.go.id>.

III. JADWAL KEGIATAN (TENTATIF)

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	27 Juli 2022
2.	Pendaftaran	27 Juli 2022 s.d 10 Agustus 2022
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	11 Agustus 2022
4.	Seleksi kompetensi bidang (tes tulis)	15 Agustus 2022
5.	Seleksi kompetensi mansoskul (asesmen)	16 Agustus 2022
6.	Wawancara	1 September 2022

IV. KETENTUAN LAIN

1. Pelaksanaan Seleksi menyesuaikan kebijakan Pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi;
2. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui laman <http://pansel.kemenumham.go.id>;
3. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
4. Peserta tidak diperkenankan berhubungan dengan Panitia Seleksi selama proses seleksi;
5. Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi secara sepihak apabila di kemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar;
6. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya apapun;
7. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.



Jakarta, 27 Juli 2022
Ketua Panitia Seleksi,

A handwritten signature in black ink, written over a diagonal line that extends from the top right towards the center of the page. The signature is stylized and appears to be 'ABR'.

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.